



## Analisis Determinan Opini Auditor: Bukti Empiris dari Pemerintah Kabupaten/Kota di Nusa Tenggara Barat

Suparlan<sup>1</sup>, Tommy Aria Abdi Negara<sup>2</sup>, Dediartari Mas Maheswary<sup>3</sup>,  
Zainul Azzan Antomi<sup>4</sup>, Muhammad<sup>5</sup>

<sup>1,2,3,4,5</sup> Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mataram, Nusa Tenggara Barat, Indonesia

### Article Info

#### Article history:

Received November 11, 2025  
Revised November 25, 2025  
Accepted November 28, 2025

#### Kata Kunci:

Opini Audit,  
Pendapatan Asli Daerah  
(PAD),  
Produk Domestik Regional  
Bruto (PDRB),  
Akuntabilitas Keuangan

#### Keywords:

Audit Opinion,  
Local Own-Source Revenue  
(PAD),  
Gross Regional Domestic  
Product (PDRB),  
Financial Accountability

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh kemandirian keuangan daerah yang diproksikan melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan tingkat kesejahteraan ekonomi yang diukur dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap probabilitas penerimaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh auditor BPK. Objek penelitian mencakup seluruh pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat selama periode 2020 hingga 2024. Menggunakan metode sensus, diperoleh 50 data observasi. Pengujian hipotesis dilakukan dengan teknik regresi logistik. Hasil analisis statistik deskriptif menunjukkan bahwa 96% pemerintah daerah di NTB telah memperoleh opini WTP. Hasil pengujian regresi menemukan bahwa baik PAD maupun PDRB memiliki arah hubungan positif namun tidak berpengaruh signifikan secara statistik terhadap Opini Auditor. Hal ini mengindikasikan bahwa kepatuhan terhadap standar akuntansi pemerintahan di NTB telah menjadi budaya organisasi yang merata dan tidak lagi semata-mata bergantung pada besaran sumber daya ekonomi yang dimiliki daerah.

### ABSTRACT

This study aims to empirically examine the effect of regional financial independence, proxied by Local Own-Source Revenue (PAD), and economic welfare levels, measured by Gross Regional Domestic Product (PDRB), on the probability of receiving an Unqualified Opinion (WTP) from BPK auditors. The research object encompasses all district and city governments in West Nusa Tenggara Province from 2020 to 2024. Using a census method, 50 observations were obtained. Hypothesis testing was conducted using logistic regression techniques. Descriptive statistical analysis shows that 96% of local governments in NTB have achieved WTP opinions. Regression testing results found that while both PAD and PDRB show a positive relationship direction, they do not have a statistically significant effect on Audit Opinion. This indicates that compliance with government accounting standards in NTB has become an organizational culture that is evenly distributed and no longer solely dependent on the magnitude of economic resources possessed by the region.

This is an open access article under the [CC BY](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license.



*Corresponding Author:*

Muhammad  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mataram  
Mataram, Indonesia  
Email: muhammadalhamami@gmail.com

---

## 1. PENDAHULUAN

Transparansi dan akuntabilitas merupakan dua pilar utama dalam tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Salah satu indikator paling nyata dari keberhasilan implementasi kedua pilar tersebut adalah opini audit yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), tren perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) menunjukkan perkembangan yang positif. Namun, fenomena menarik terjadi di mana fluktuasi opini masih ditemukan, seperti pada Kabupaten Sumbawa yang sempat mengalami penurunan kualitas opini pada tahun-tahun tertentu, meskipun secara umum daerah lain menunjukkan stabilitas.

Perdebatan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan ini masih terus bergulir di kalangan akademisi. Satu sisi, terdapat argumen yang menyatakan bahwa daerah dengan kemampuan fiskal tinggi—dicerminkan oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang besar—memiliki sumber daya lebih untuk menyewa tenaga ahli dan membangun sistem pengendalian internal yang mumpuni. Di sisi lain, faktor makroekonomi seperti Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dianggap sebagai cerminan kompleksitas transaksi yang justru dapat meningkatkan risiko salah saji jika tidak dikelola dengan baik, atau sebaliknya, menuntut pengawasan publik yang lebih ketat. Selain aspek kepatuhan, perolehan opini audit yang berkualitas juga menjadi krusial karena terbukti mampu memediasi hubungan antara kemandirian keuangan daerah dengan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang pada akhirnya bermuara pada kesejahteraan masyarakat [1]

Kesenjangan hasil penelitian (*research gap*) juga masih terlihat jelas. Studi oleh [2] menemukan pengaruh positif dari variabel keuangan dan kekayaan daerah terhadap opini audit. Sebaliknya, penelitian [3] dan [4] justru menemukan bahwa indikator keuangan seperti rasio kemandirian tidak memiliki korelasi signifikan terhadap opini yang diterima. Ketidakkonsistenan ini mendorong perlunya penelitian ulang dengan konteks yang lebih spesifik dan data yang lebih terkini. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk menganalisis secara mendalam apakah PAD dan PDRB benar-benar menjadi determinan utama bagi pemerintah kabupaten/kota di NTB dalam meraih opini audit terbaik selama periode 2020-2024.

Dalam konteks sektor publik, rakyat bertindak sebagai prinsipal yang mempercayakan sumber daya kepada pemerintah daerah sebagai agen. Teori keagenan menjelaskan bahwa audit independen diperlukan untuk mengurangi asimetri informasi antara kedua belah pihak. Pemerintah daerah dengan sumber daya besar (PAD dan PDRB tinggi) memiliki insentif lebih besar untuk membuktikan kinerjanya melalui opini audit WTP guna menjaga kepercayaan publik (*prinsipal*). Selain perspektif agensi, penelitian ini juga mengadopsi Teori Institusional khususnya konsep Isomorfisma Koersif. Teori ini menjelaskan bahwa organisasi (Pemerintah Daerah) cenderung menjadi homogen (seragam) karena menghadapi tekanan regulasi yang sama. Dalam konteks NTB, tekanan standar akuntansi (SAP) dan pemeriksaan BPK yang ketat memaksa seluruh daerah—baik yang memiliki PAD tinggi maupun rendah—untuk mematuhi standar yang sama, sehingga menciptakan keseragaman kualitas pelaporan keuangan. Dalam diskursus yang lebih luas, kompleksitas pengelolaan sumber daya yang tercermin dari nilai aset pemerintah daerah juga sering dikaitkan dengan risiko keterlambatan audit (*audit delay*),

meskipun variabel opini audit itu sendiri tidak selalu berdampak signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan tersebut [5].

PAD merupakan representasi kemandirian keuangan daerah. [6] menyoroti bahwa PAD yang tinggi memberikan fleksibilitas anggaran bagi pemerintah daerah. Fleksibilitas ini memungkinkan investasi pada sistem informasi akuntansi yang lebih canggih dan pengembangan kapasitas SDM pengelola keuangan. Dengan infrastruktur pelaporan yang lebih baik, potensi kesalahan penyajian material dapat diminimalisir, sehingga peluang meraih opini WTP meningkat.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Opini Auditor PDRB menggambarkan total nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan di suatu wilayah, yang juga mencerminkan tingkat kemakmuran masyarakatnya. [7] menyatakan bahwa tingkat kekayaan pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap opini audit. Logika yang mendasarinya adalah daerah dengan ekonomi maju (PDRB tinggi) menghadapi tekanan politis dan sosial yang lebih kuat dari masyarakatnya untuk transparan. Tekanan ini memaksa pemerintah daerah untuk menyajikan laporan keuangan yang lebih akuntabel.

## 2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain kausalitas. Populasi penelitian meliputi seluruh entitas pemerintah daerah tingkat II di Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang terdiri dari 8 Kabupaten dan 2 Kota. Jenis data yang di gunakan data sekunder kuantitatif yang sumber resmi dari BPK RI, BPS NTB, Teknik pengambilan sampel menggunakan metode sensus (*saturation sampling*), sehingga seluruh anggota populasi digunakan sebagai unit analisis selama periode pengamatan 5 tahun (2020-2024). Total observasi yang diolah berjumlah 50 data panel.

Variabel dependen dalam studi ini adalah Opini Auditor, yang diukur menggunakan variabel dummy (skala nominal), di mana kode 1 diberikan untuk opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan kode 0 untuk opini selain WTP. Variabel independen terdiri dari PAD (realisasi dalam Rupiah) dan PDRB (Rupiah per kapita).

Mengingat variabel dependen bersifat dikotomis, teknik analisis data yang digunakan adalah Regresi Logistik (*Logistic Regression*) dengan bantuan perangkat lunak statistik. Model regresi yang diajukan adalah:

$$\ln \frac{P}{1-P} = \alpha + \beta_1 PAD + \beta_2 PDRB + e$$

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif Berdasarkan pengolahan data yang bersumber dari LHP BPK dan BPS, berikut adalah gambaran statistik deskriptif variabel penelitian:

Tabel 1. Statistik Deskriptif

Variabel	N	Minimum	Maksimum	Rata-rata (Mean)	Std. Deviasi
Opini Audit (Y)	50	0	1	0.96	198
PAD (Rp Miliar)	50	46.99	547.94	215.72	126.17
PDRB (Rp Juta)	50	15,15	235,09	43,52	51,44

Interpretasi:

- a. Opini Audit: Rata-rata 0,96 menunjukkan 96% sampel (48 dari 50 data) mendapat opini WTP (kode 1).

- b. PAD: Rentang PAD cukup lebar, dari terendah Rp46,99 Miliar hingga tertinggi Rp547,94 Miliar.
- c. PDRB: Menunjukkan ketimpangan ekonomi dengan standar deviasi yang tinggi (51.449), melebihi nilai rata-ratanya (43.522), yang dipicu oleh nilai ekstrem maksimum (Kabupaten Sumbawa Barat).

Dari Tabel 1 terlihat bahwa rata-rata penerimaan opini WTP sangat tinggi, yaitu 0,96 atau 96%. Hal ini menunjukkan bahwa dari 50 observasi, sebanyak 48 LKPD mendapatkan opini WTP, dan hanya 2 kasus yang tidak WTP (terjadi pada Kabupaten Sumbawa tahun 2022 dan 2023). Rata-rata PAD di kabupaten/kota se-NTB mencapai Rp215,72 Miliar, dengan nilai tertinggi dicapai oleh Kabupaten Lombok Timur pada tahun 2024. Sementara itu, ketimpangan ekonomi terlihat dari rentang PDRB yang cukup lebar, di mana Kabupaten Sumbawa Barat mencatatkan PDRB tertinggi (efek sektor pertambangan) mencapai Rp235 juta per kapita, jauh di atas rata-rata daerah lainnya.

Hasil Uji Regresi Logistik Pengujian hipotesis dilakukan untuk melihat probabilitas pengaruh variabel independen terhadap opini audit. Ringkasan hasil regresi adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Hasil Regresi Logistik

Variabel	Koefisien (B)	Sig. (P-value)	Keterangan
Konstanta	2,172	188	-
PAD (X1)	3,519	607	Tidak Signifikan
PDRB (X2)	8	711	Tidak Signifikan

Catatan: Nilai Nagelkerke R Square sebesar 0.026 (2,6%) menunjukkan kemampuan model dalam menjelaskan variasi Opini Audit sangat kecil.

### 3.1 Pembahasan

Hasil pengujian statistik menunjukkan nilai signifikansi untuk variabel PAD sebesar 0,607, yang jauh di atas taraf nyata 0,05. Artinya, H1 ditolak. Penelitian ini membuktikan bahwa besar kecilnya Pendapatan Asli Daerah tidak memiliki dampak nyata terhadap kemungkinan pemerintah daerah di NTB untuk meraih opini WTP. Temuan ini menegaskan bahwa kualitas pelaporan keuangan di sektor publik bersifat inklusif, bukan eksklusif milik daerah kaya. Ketidaksignifikanan variabel PAD menunjukkan bahwa hambatan finansial (*cost of compliance*) dalam menyusun laporan keuangan berkualitas telah teratasi. Sistem akuntansi berbasis teknologi (seperti SIPD) memungkinkan daerah dengan kapasitas fiskal terbatas tetap mampu menghasilkan laporan yang andal, menyetarakan *playing field* antara daerah kaya dan daerah berkembang. Rendahnya pengaruh PAD mengindikasikan bahwa hambatan biaya untuk membangun sistem pengendalian internal (SPI) yang andal telah berhasil diatasi melalui komitmen manajerial dan efisiensi alokasi anggaran, bukan semata-mata karena kelimpahan dana mandiri.

Temuan ini menarik karena berbeda dengan asumsi umum bahwa uang menjamin kualitas. Data lapangan menunjukkan bahwa daerah dengan PAD yang relatif lebih kecil (seperti Kabupaten Lombok Utara atau Kota Bima) mampu mempertahankan opini WTP secara konsisten, setara dengan daerah ber-PAD besar seperti Kota Mataram. Fenomena serupa juga ditemukan dalam studi lain yang mengungkapkan bahwa opini audit tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan daerah, melainkan variabel seperti pendapatan transfer (*intergovernmental revenue*) dan upaya pajak (*tax effort*) yang justru memberikan kontribusi positif yang lebih nyata [8]. Hal ini sejalan dengan temuan [3] yang menyatakan rasio kemandirian tidak berpengaruh terhadap opini audit. Indikasi ini

menunjukkan bahwa komitmen pimpinan daerah dan kepatuhan terhadap regulasi akuntansi lebih berperan penting daripada sekadar ketersediaan dana mandiri.

Pengaruh PDRB terhadap Opini Auditor Serupa dengan PAD, variabel PDRB juga menunjukkan nilai signifikansi 0,711 ( $> 0,05$ ), sehingga H2 ditolak. Tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat atau kekayaan daerah terbukti tidak menjadi penentu utama kualitas pelaporan keuangan.

Meskipun Kabupaten Sumbawa Barat memiliki PDRB yang sangat ekstrem tingginya dibanding daerah lain, hal tersebut tidak serta merta membuat probabilitas WTP-nya berbeda secara signifikan dengan daerah yang PDRB-nya lebih rendah. Fenomena ini mendukung argumen bahwa opini WTP di NTB telah menjadi standar normatif (kewajiban dasar) yang harus dipenuhi oleh seluruh Pemda tanpa memandang status ekonomi daerah tersebut. Secara statistik, ketidaksignifikanan ini juga disebabkan oleh fenomena *Ceiling Effect* (Efek Langit-langit), di mana tingkat capaian WTP di NTB telah mencapai titik jenuh maksimal (96%). Variabilitas data yang sangat rendah pada variabel dependen menyebabkan faktor ekonomi (PDRB) kehilangan daya jelaskannya, karena baik daerah dengan ekonomi agraris maupun daerah industri/tambang (seperti Sumbawa Barat) telah mencapai standar kepatuhan yang setara. Konsistensi hasil ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang menyimpulkan bahwa variabel fundamental seperti tingkat kekayaan daerah, ukuran pemerintah daerah, maupun pertumbuhan ekonomi tidak secara otomatis menjadi determinan utama dalam kinerja keuangan maupun kualitas audit yang dihasilkan [9]. Kasus Kabupaten Sumbawa yang mengalami fluktuasi opini pada tahun 2022-2023 meskipun memiliki basis ekonomi yang kuat memberikan bukti empiris penting. Penurunan opini tersebut, berdasarkan LHP BPK, umumnya disebabkan oleh kelemahan administratif (SPI dan pengelolaan Belanja Daerah) dan bukan karena ketidakmampuan ekonomi. Kondisi ini mempertegas bukti empiris bahwa keberadaan temuan audit—sebagai representasi kelemahan pengendalian internal—memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap kinerja instansi, yang seringkali lebih dominan pengaruhnya dibandingkan sekadar status opini audit itu sendiri [10]. Hal ini mengonfirmasi bahwa determinan utama Opini Audit adalah kepatuhan administratif (*administrative compliance*), bukan sumber daya ekonomi (*economic resources*). Hasil ini mengonfirmasi studi [4] yang tidak menemukan pengaruh signifikan faktor keuangan terhadap kinerja/opini, namun bertentangan dengan studi [7].

Lebih lanjut, Nilai Nagelkerke R Square yang rendah (2,6%) justru memberikan wawasan krusial: bahwa 97,4% faktor penentu opini audit di NTB adalah variabel non-keuangan. Faktor-faktor 'soft' seperti komitmen pimpinan (*tone at the top*), kompetensi aparatur, dan tindak lanjut rekomendasi BPK memegang peranan jauh lebih vital dibandingkan indikator makroekonomi.

#### 4. SIMPULAN

Berdasarkan analisis data terhadap 10 Kabupaten/Kota di Provinsi NTB periode 2020-2024, dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan Opini Audit. Mayoritas pemerintah daerah (96%) telah berhasil meraih opini WTP, menunjukkan bahwa kualitas pelaporan keuangan di NTB sudah sangat baik dan merata, tidak lagi didominasi oleh daerah-daerah kaya atau yang memiliki kemandirian fiskal tinggi. Implikasi praktis dari temuan ini adalah pemerintah daerah harus tetap fokus pada penguatan sistem pengendalian internal dan kepatuhan regulasi, karena faktor sumber daya ekonomi semata tidak menjamin kualitas akuntabilitas. Mengingat opini WTP telah menjadi standar umum, fokus pemerintah daerah di NTB tidak boleh lagi hanya sekadar 'mengejar WTP', melainkan harus bergeser pada peningkatan 'Kualitas Belanja' (*Quality of Spending*). Opini WTP harus dijadikan landasan awal untuk memastikan bahwa setiap rupiah APBD tidak hanya dilaporkan secara wajar, tetapi juga efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

## REFERENSI

- [1] D. Indramawan, A. B. Handayanto, dan A. Djajanti, “Pentingnya Opini Audit sebagai Pemediasi Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia,” *Jurnal Riset dan Aplikasi Akuntansi dan Manajemen*, vol. 5, no. 2, 2021.
- [2] N. M. D. Pradnyani dan N. P. S. H. Mimba, “Opini Audit dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dengan Realisasi PAD sebagai Pemediasi,” *E-Jurnal Akuntansi*, vol. 30, no. 12, pp. 3150-3162, 2020.
- [3] A. S. Kamila, Firmansyah dan E. Frymaruah, “Determinasi Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Di Kabupaten/Kota Sumatera Selatan Tahun 2018 - 2022,” *Jurnal Media Wahana Ekonomika*, vol. 21, no. 3, 2024.
- [4] A. B. Pratama, M. Maslichah dan M. C. Mawardi, “Pengaruh Opini Audit BPK, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Intergovernmental Revenue Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Di Jawa Timur Tahun 2017-2019,” *e Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, vol. 11, no. 02, 2022.
- [5] K. Pambudi, F. Fachrudin, R. Robin dan N. P. A. Muhammad, “Opini Audit, Nilai Aset, Dan Kemandirian Daerah Sebagai Determinan Audit Delay: Studi Empiris Pada Pemerintah Provinsi Di Indonesia 2018-2021,” *Jurnal Akuntansi, Keuangan dan Auditing*, vol. 5, no. 1, 2024.
- [6] F. A. Zahrah, M. R. Zaen dan S. P. Mellinia , “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Opini Audit, Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah,” *Jurnal Mutiara Ilmu Akuntansi (JUMIA)*, vol. 2, no. 1, 2024.
- [7] Firdaus dan M. Haikal, “Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Opini Audit,” *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, vol. 12, no. 1, 2023.
- [8] B. P. Sari dan F. I. Arza, “Pengaruh Opini Audit, Intergovernmental Revenue, dan Tax Effort terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 - 2022,” *Jurnal Nuansa Karya Akuntansi*, vol. 3, no. 2, 2025.
- [9] A. A. Aziz dan E. Kusumawati, “Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Tingkat Kekayaan Daerah, Tingkat Ketergantungan Pada Pusat, Pertumbuhan Ekonomi, dan Temuan Audit BPK Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah,” *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, vol. 4, no. 1, 2024.
- [10] D. Aprilia dan R. B. Hendaris, “Pengaruh Opini Audit dan Temuan Audit Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat 2019-2023),” *Ekonomis : Journal of Economics and Business*, vol. 9, no. 02, 2025.